



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA
KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**



WATUTUMOU, JULI 2023

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 – 2026 sebagaimana dijabarkan melalui Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dimaksud, akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara memperhatikan kebijakan-kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi penguatan penggunaan teknologi dan informasi yang sistematis atas pengelolaan *database* dan peningkatan standar kompetensi ASN yang mengarah pada transformasi pengembangan kompetensi aparatur secara *e-learning*, *mentoring* dan *on job training* serta peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam penerapan pola kerja sehat.

Optimalisasi seluruh sumber daya dan memperhatikan lingkungan strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2024 disusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana direncanakan dalam Rancangan Akhir Renja-PD ini. Disamping sebagai Dokumen Perencanaan, Rancangan Akhir Renja-PD ini juga akan menjadi Bahan Evaluasi dan Tolok Ukur Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Akhirnya, semoga pelaksanaan Rancangan Akhir Renja-PD ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kapasitas dan produktivitas sumber daya aparatur dalam meningkatkan daya saing aparatur di Provinsi Sulawesi Utara yang tercinta ini.

Watutumou, Juli 2023

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA



Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M. Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650509 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (T-C-29)	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (T-C-30)	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (T-C-31)	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (T-C-32)	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	22
3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB V PENUTUP	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rancangan Akhir Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Akhir Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Akhir Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Rancangan Akhir Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Akhir Renja-PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja-PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Renja-PD Tahun 2024 harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain, untuk itu dalam penyusunannya memperhatikan hal-hal antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada tahun 2024.
3. Program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja-PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
5. Peluang dan tantangan BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi era Globalisasi.

Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari periode RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 – 2026 sebagaimana dijabarkan dalam Rancangan RKPDP Tahun 2024, disusun sebagai langkah strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Tingkat IV Pegawai Negeri Sipil dan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan dan Teknis Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2007;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Utara.
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Program Kegiatan Tahunan;
- b. Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
- c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2024;

- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada.
- g. Peluang dan tantangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi era Globalisasi.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta program kerja Kepala Daerah, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Utara dalam satu tahun ke depan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Utara 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4.Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan Tahun 2022 yang direncanakan:

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	REALISASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Presentase Terlaksannya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	94,77%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP dan LKPJ/LPPD	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen: - LKIP - LKPJ/LPPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Terwujudnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terlaksananya koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	12 Bulan	12 Bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi BMD Prima	100%	50%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Prima	100%	50%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang di Beli	112 Stell	112 Stell
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112 ASN	112 ASN
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Prima	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan di beli	3 Paket	3 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor di beli	30 Buah	30 Buah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga di beli	5 Paket	5 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersedianya Bahan Logistik Kantor di beli	4 Paket	4 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rakor dan Konsultasi diikuti	6 Kali	6 Kali
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terbelinya Aset BMD yang dibutuhkan	100%	100%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan di Beli	1 Unit	1 Unit
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel dibeli	160 Unit	160 Unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya di beli	15 Unit	15 Unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prima	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya	12 Bulan	12 Bulan

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET	REALISASI
		jasa Pelayanan Umum Kantor		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BMD dengan baik	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terawat dan layak jalan	1 Unit	1 Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terawat dan layak jalan	9 Unit	9 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terawatnya Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Terawat Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang Berkompetensi	100%	88%
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN Lulus Pengembangan Kompetensi dengan Predikat Baik (80,01)	100 %	91,25 %
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	560 ASN	511 ASN
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi	100 %	100 %
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	3 Dokumen	3 Dokumen (Dokumen Akreditasi, Penjaminan Mutu Pelatihan, Orasi Ilmiah)
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Dokumen Pengelolaan Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
	Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Pengelolaan Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 ASN	2 ASN
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan, Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	(1). Jumlah Peserta Pelatihan Dasar CPNS (2). Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kompetensi	290 ASN	283 ASN
Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	1 Dokumen

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

Untuk mengembangkan kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Utara pasti akan menghadapi kendala dikarenakan kondisi mentalitas dan degradasi moral yang telah terjadi dan diwariskan oleh generasi sebelumnya. Kondisi ASN Provinsi Sulawesi Utara saat ini memiliki beberapa permasalahan umum yaitu:

- Pemasalahan SDM termasuk ketidakseimbangan dalam jumlah, kualitas, dan kesesuaian dalam alokasi pegawai negeri;
- Rendahnya produktivitas disebabkan oleh inefisiensi dan ketidakefektifan pelayanan publik. Buruknya layanan yang diberikan dianggap menjadi hal yang "biasa" pada saat ini yang ditafsirkan sebagai kegagalan untuk

- memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis;
- c. ASN Provinsi Sulawesi utara dipandang kurang memiliki dua kualitas penting untuk menjadi birokrat “kelas dunia”, yaitu orientasi hasil dan komitmen untuk melayani masyarakat.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:
- Analisis lingkungan eksternal menghasilkan gambaran kondisi lingkungan luar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang melahirkan sejumlah implikasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:
- a. Meningkatnya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance;
 - b. Terciptanya aparatur yang bebas dari KKN;
 - c. Terwujudnya Birokrasi yang menghendaki profesionalisme Aparatur;
 - d. ASN yang adaptif terhadap perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;
 - e. Tidak ada lagi ego sektoral/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - f. Meningkatnya kinerja dan kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Utara.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
- Selain itu pula analisis lingkungan eksternal memerlukan kebijakan/tindakan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, diantaranya:
- a. Mengembangkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai *Learning Centre* bagi diklat Aparatur;
 - b. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah;
 - c. Ketersediaan dana dari APBD Provinsi Sulawesi Utara yang memadai;
 - d. Adanya komitmen pimpinan daerah;

- e. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
- f. Pengembangan sistem karier berdasarkan prestasi kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian rencana kerja terhadap 2 (dua) program, dan 10 (Sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan, maka capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 adalah 91,92%, hal tersebut akan menjadi dasar perkiraan

target dan realisasi di tahun berjalan 2022 dan capaian terhadap Renstra BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana disajikan dalam Tabel T-C.29.

TABEL TC-29 (FORMULIR E.55)
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
IRENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2022

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisis akuntabilitas dilaksanakan dengan cara melakukan analisis-analisis berkaitan dengan pencapaian kinerja dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan periode Tahun 2021 - 2026 terhadap target renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Capaian indikator kinerja setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Adapun Capaian kinerja BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara dan proyeksi peningkatan akuntabilitasi kinerja di tahun berjalan dan tahun selanjutnya dapat dilihat dalam penyajian Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sulawesi Utara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Indikator Kinerja (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase ASN Provinsi Sulawesi Utara yang Berkompetensi			25,00%	30,00%	40,00%	60,00%	70,00%	90,00%	25,71%	31,99%	40,00%	60,00%	70,00%	90,00%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam prioritas pembangunan, BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tanggungjawab dalam mewujudkan program, yaitu **“Pengembangan SDM ASN Provinsi Sulawesi Utara”** melalui sistem pengembangan kompetensi dengan pendekatan **sistemik holistik sustainable** dalam rangka mewujudkan **Human Capital Aparatur** berbasis kompetensi bidang tugas.

Dalam rangka pengembangan pelayanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara dituntut untuk lebih responsif terhadap berbagai isu yang berkembang baik dari internal maupun eksternal. Isu yang berasal dari internal pada umumnya dalam bentuk kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), sedangkan isu eksternal muncul dalam bentuk peluang (*opportunitiy*) dan tantangan (*threaths*) yang pada umumnya berasal dari luar lingkungan. Dalam mengelola berbagai isu tersebut digunakan **Matriks SWOT** untuk mengidentifikasikan dan merumuskan strategi yang paling tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi suatu organisasi. Pengidentifikasian isu-isu tersebut dapat dirumuskan kedalam matriks sebagai berikut:

Matriks SWOT BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara

<div> <div>INTERNA</div> <div>EKSTERNA</div> </div>	STRENGTHS <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD, Komitmen meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan 2. Renstra BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 3. Ketersediaan kuantitas SDM Aparatur sebagai peserta pengembangan kompetensi 4. Terakreditasinya BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara sebagai Penyelenggara Kediklatan Manajerial 	WEAKNESSES <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Anggaran pengembangan kompetensi SDM Aparatur 2. Ketersediaan Jumlah WI belum memadai 3. Belum memadai prasarana dan sarana serta penunjang pendidikan dan pelatihan 4. Belum optimalnya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
	OPPORTUNITIES <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD, Inovasi pelayanan publik setiap PD menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Pergub 59/2020 tentang Pengembangan Kompetensi PNS Provinsi Sulawesi Utara 3. Pola Kemitraan dengan Kab/Kota dan instansi vertikal dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi 	<div> Strategi S-O: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan inovasi penyelenggaraan diklat dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Peningkatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Jabatan Fungsional bagi ASN minimal 20JP/orang/tahun 3. Peningkatan sinkronisasi dengan Kab/Kota dan Instansi Vertikal lainnya dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi </div> <div> Strategi W-O: <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi anggaran pada program pengembangan sumber daya manusia 2. Pelaksanaan Analisis Jabatan terhadap WI 3. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana serta penunjang pendidikan dan pelatihan 4. Peningkatan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Jabatan Fungsional secara sistemik-holistik dan sustainable berdasar Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) </div>
	THREATS <ol style="list-style-type: none"> 1. Tantangan regulasi aparatur memenuhi standar kompetensi teknis dan jabatan fungsional sering berubah 2. Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 3. Tantangan terwujudnya SMART ASN (Service, Mentality, Achievement, Responsibility, Transformation) 4. Tantangan Manajemen Corporate University 	<div> Strategi S-T: <ol style="list-style-type: none"> 1. Transformasi pengembangan kompetensi Aparatur E-Learning, Blended Learning, Mentoring, dan On Job Training 2. Peningkatan pembinaan dan pengembangan kompetensi berbasis Corporate University </div> <div> Strategi W-T: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi, Bimtek dan FGD terkait peraturan perundang-undangan pengembangan kompetensi 2. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan TI 3. Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pengembangan kompetensi berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan Kurikulum Kediklatan </div>

Faktor-faktor utama yang paling berpengaruh terhadap BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara di atas dapat dirumuskan menjadi isu strategis dalam peningkatan SDM Aparatur melalui pelatihan pada BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan prioritas-prioritas pembangunan

yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Dari hasil analisis diatas terhadap isu-isu tersebut, maka dapat ditentukan isu strategis dari BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2021-2026 adalah "**Masih Kurangnya Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Utara**".

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

1. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi acuan dan kebutuhan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun rencana kerja sehingga semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendukung dalam pencapaian target RKPD;
2. Rancangan Akhir Renja-PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Rancangan Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah;
3. Adapun berdasarkan telaah (*review*) terhadap RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, maka Program dan Kegiatan yang direncanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan RKPD;
4. Hal-hal tersebut di atas dapat digambarkan pada Tabel T-C.31 berikut.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Utara

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					18.981.806.276,00					18.981.806.276,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Watutumu	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	15.982.666.090,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Watutumu	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	15.982.666.090,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Watutumu	Presentase Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP dan LKIP/LPPD	100%	53.625.491,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Watutumu	Presentase Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP dan LKIP/LPPD	100%	53.625.491,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Watutumu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.783.734	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Watutumu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.783.734	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Watutumu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.570.415	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Watutumu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.570.415	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Watutumu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.959.016	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Watutumu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.959.016	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Watutumu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.137.816	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Watutumu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.137.816	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Watutumu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.137.816	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Watutumu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.137.816	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Watutumu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	12.036.694	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Watutumu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	12.036.694	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Watutumu	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima	100%	11.010.326.703	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Watutumu	Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima	100%	11.010.326.703	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Watutumu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	10.185.692.820	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Watutumu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	10.185.692.820	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Watutumu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	762.584.160	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Watutumu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	762.584.160	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Watutumu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	28.284.132	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Watutumu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	28.284.132	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Watutumu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	3.602.385	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Watutumu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	3.602.385	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Watutumu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.086.135	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Watutumu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.086.135	
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Watutumu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.697.185	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Watutumu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.697.185	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Watutumu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	16.994.251	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Watutumu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	16.994.251	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Watutumu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.385.635	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Watutumu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.385.635	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Watutumu	Presentase Administrasi BMD Prima	100%	20.841.379	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Watutumu	Presentase Administrasi BMD Prima	100%	20.841.379	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Watutumu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.400.163	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Watutumu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.400.163	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Watutumu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	9.441.216	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Watutumu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	9.441.216	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Watutumu	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Prima	100%	358.875.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Watutumu	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Prima	100%	358.875.500	
	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Watutumu	Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	252.247.500	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Watutumu	Jumlah Paket Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	252.247.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Wilayah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	106.628.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Wilayah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	106.628.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Watutumu	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Prima	100%	319.150.769	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Watutumu	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Prima	100%	319.150.769	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Watutumu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.616.340	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Watutumu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	43.616.340	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Watutumu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Unit	67.936.329	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Watutumu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Unit	67.936.329	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Watutumu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Unit	40.143.150	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Watutumu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Unit	40.143.150	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Watutumu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	12.094.950	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Watutumu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	12.094.950	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Wilayah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	155.360.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Wilayah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	155.360.000	
2	Pengadaan Barang Hiliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Watutumu	Persentase Terbelainya Aset BMD yang dibutuhkan	100%	1.565.659.884	Pengadaan Barang Hiliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Watutumu	Persentase Terbelainya Aset BMD yang dibutuhkan	100%	1.565.659.884	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Watutumu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	681.587.175	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Watutumu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	681.587.175	
	Pengadaan Mebel	Watutumu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	17.529.120	Pengadaan Mebel	Watutumu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	17.529.120	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Watutumu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	422.543.589	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Watutumu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	422.543.589	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Watutumu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	444.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Watutumu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	444.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Watutumu	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prima	100%	1.447.703.534	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Watutumu	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prima	100%	1.447.703.534	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Watutumu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.336.214	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Watutumu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.336.214	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Watutumu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	440.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Watutumu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	440.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Watutumu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.002.367.320	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Watutumu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.002.367.320	
	Pemeliharaan Barang Hiliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Watutumu	Persentase Pemeliharaan Aset BMD dengan baik	100%	1.206.482.830	Pemeliharaan Barang Hiliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Watutumu	Persentase Pemeliharaan Aset BMD dengan baik	100%	1.206.482.830	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Watutumu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	74.388.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Watutumu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	74.388.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Watutumu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	264.924.080	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Watutumu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	264.924.080	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Watutumu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	90.170.250	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Watutumu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	90.170.250	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Watutumu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	777.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Watutumu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	777.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Watutumu	Persentase ASN yang Berkompetensi	60%	2.999.140.186,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Watutumu	Persentase ASN yang Berkompetensi	60%	2.999.140.186,00	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Watutumu	Persentase ASN Lulus Pengembangan Kompetensi dengan Predikat Baik (> 80,01)	92%	1.095.143.079,00	Pengembangan Kompetensi Teknis	Watutumu	Persentase ASN Lulus Pengembangan Kompetensi dengan Predikat Baik (> 80,01)	92%	1.095.143.079,00	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Piliha Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Watutumu	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2100 Orang	1.095.143.079	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Piliha Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Watutumu	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2100 Orang	1.095.143.079	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Watutumu	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi	5 Sertifikat	1.903.997.107	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Watutumu	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi	5 Sertifikat	1.903.997.107	
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Watutumu	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	337.591.000	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Watutumu	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	337.591.000	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Watutumu	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	100 Orang	607.334.100	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Watutumu	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	100 Orang	607.334.100	
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Watutumu	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	20 Laporan	49.154.000	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Watutumu	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	20 Laporan	49.154.000	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Watutumu	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	5 Dokumen	159.107.810	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Watutumu	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	5 Dokumen	159.107.810	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Semua Wilayah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	320 Orang	750.810.197	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Semua Wilayah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	320 Orang	750.810.197	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara dituntut untuk lebih mengembangkan sumber daya yang mumpuni, Ada konsekuensi yang bertambah, bukan semata-mata pendidikan dan pelatihan tapi juga ada fungsi standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi itu sendiri yang meliputi diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, pembekalan, dan orientasi dalam rangka melaksanakan pengembangan aparatur pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintahan.

1. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga menelaah usulan program dan kegiatan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota dengan melaksanakan rapat koordinasi antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan BKPSDM Kabupaten/Kota.
2. Peran Penting Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjang tercapainya target RPJMD melalui peningkatan dan pengembangan kompetensi aparaturnya. Karena tercapainya target RPJMD merupakan cermin dari baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang mana bermula dari dan sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki ASN. Oleh karena itu sebagai fungsi penunjang pemerintahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak bersinggung langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat dan menelaah usul serta program dari masyarakat melainkan fokus pada pengembangan ASN sebagai aset untuk menciptakan birokrasi yang professional.
3. Pada Tabel T-C.32 diuraikan tidak ada hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dalam hal ini DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun berdasarkan hal tersebut terhadap Rancangan Rencana Kerja BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, belum ada usulan yang tertuang dalam "Pokir" DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tabel di bawah ini, oleh karena itu dalam Tabel T-C.32 tidak termuat usulan kegiatan.

NO	POKIR DPRD	LOKASI	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	STATUS DITERIMA / DITOLAK	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	STATUS	ANGGARAN
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Era disruptif telah banyak merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali pada organisasi pemerintahan atau birokrasi di Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan memiliki kompetensi unggul. Maka dari itu pemerintah harus bisa mempersiapkan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui berbagai cara dan upaya yang efektif dan efisien, termasuk perubahan lingkungan saat ini disebabkan pengaruh revolusi teknologi 4.0 (sistem teknologi digital), oleh karena itu kompetensi ASN yang dibutuhkan saat ini bukan hanya yang piawai dalam hal teknis, tetapi juga yang memiliki kompetensi soft skill. Adapun beberapa kompetensi soft skill yang dibutuhkan masa kini agar dapat menghadapi tantangan perubahan diantaranya kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif dan manajemen manusia. Selanjutnya kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif juga dibutuhkan. Sistem lama yang serba fisik, akan tergantikan dengan otomatisasi pekerjaan berbasis digital yang benar-benar baru dan efisien, serta lebih bermanfaat. Pendidikan dan pelatihan ASN merupakan bagian dari metode pengembangan kompetensi pegawai. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.

Setelah kebijakan kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19, kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada penjagaan dan penguatan daya beli, jaring pengaman sosial, dan insentif pengangguran sejatinya harus menjadi prioritas. Lalu, kebijakan penjagaan kapasitas produksi nasional. Sektor dominan dan industri masif perlu pengawalan kebijakan agar tidak terus merosot dan merumahkan pekerja lebih banyak lagi. Barulah kemudian masuk ke penyelamatan sektor moneter beserta penjagaan nilai mata uang. Arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur adalah searah dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 bidang pembangunan aparatur negara adalah: Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2016-2019) yang menitikberatkan pada: Profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang mampu mendukung pembangunan nasional. Dari rumusan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa fokus prioritas, yakni:

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
2. Pemerintahan yang efektif dan efisien;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sejalan dengan prioritas kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional tentang reformasi birokrasi, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara sangatlah penting peranannya. Reformasi birokrasi berarti adanya perubahan mendasar dalam birokrasi, yang sangat erat kaitannya dengan aparatur sebagai sumberdaya yang selama ini disorot sebagai titik lemah birokrasi. Untuk memberdayakan aparatur maka dibutuhkan berbagai pendidikan ataupun pelatihan dalam mengasah ketrampilan dan keahlian sesuai harapan dalam reformasi Birokrasi.

Sebagai satu-satunya Lembaga Diklat yang terakreditasi di Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara bertanggungjawab mensukseskan pencapaian prioritas tersebut dengan terus membina dan mengembangkan aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi 4 Kota dan 11 Kabupaten, dengan senantiasa menyediakan Program dan kegiatan Kediklatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD Tahun 2024

Dengan memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

Tujuan

Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran

Meningkatnya Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Utara

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

- a. Era disruptif telah banyak mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara sebagai "Learning Centre" yang mulai bergeser paradigma tentang pengembangan ASN secara konvensional menuju pengembangan ASN berbasis kegiatan inti organisasi dengan pendekatan human capital, yang menempatkan sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang pelayanan publik di Sulawesi Utara. Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan reformasi birokrasi bidang SDM melalui pendidikan dan pelatihan berbasis digital dan mengintegrasikan lebih banyak unsur yang terlibat, merupakan modal awal yang baik untuk menciptakan SDM aparatur yang semakin profesional, serta memiliki *mind-set* dan *culture-set* yang mencerminkan integritas dan kinerja yang semakin tinggi.
- b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perencanaan Tahun 2024 menjadi bagian dari 10 Program Prioritas Gubernur Sulawesi Utara 2021-2026, yakni "Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta dukungan pembiayaan ekosistem digital agar Sulut lebih maju sebagai Smart Province". Program prioritas ini bertujuan mewujudkan Visi "Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik". Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir Renja BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada umumnya di Kantor BPSDMD

Provinsi Sulawesi Utara wilayah Kabupaten Minahasa Utara Kecamatan Kalawat Kelurahan Watutumou. Oleh sebab itu mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasar Permendagri Nomor 90 tahun 2019 telah menetapkan 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan di Tahun 2024 dengan total kebutuhan anggaran untuk merealisasikannya berjumlah Rp. 18.981.806.276,- (*Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*). Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud adalah: (lihat juga lampiran Tabel T-C.33).

- c. Sebagaimana perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024 yang diawali pada bulan Januari Tahun 2024 sudah sesuai dengan RKPD. Hal ini dapat terlihat pada penjabaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di bawah ini:

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1 *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- 1.2 *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
- 1.3 *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
- 1.4 *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*
- 1.5 *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*
- 1.6 *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1 *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
- 2.2 *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
- 2.3 *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
- 2.4 *Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*
- 2.5 *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*

- 2.6 *Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*
- 2.7 *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*
- 2.8 *Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- 3.1 *Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*
- 3.2 *Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*
- 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- 4.1 *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
- 4.2 *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*
- 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 5.1 *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
- 5.2 *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor*
- 5.3 *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
- 5.4 *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
- 5.5 *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 6.1 *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
- 6.2 *Pengadaan Mebel*
- 6.3 *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
- 6.4 *Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 7.1 *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
- 7.2 *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik*
- 7.3 *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 8.1 *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan*
- 8.2 *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

8.3 *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

8.4 *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

II PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1 Pengembangan Kompetensi Teknis

1.1 *Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kongkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum*

2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

2.1 *Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi*

2.2 *Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota*

2.3 *Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar*

2.4 *Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional*

2.5 *Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan, Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*

d. Tabel rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2024**

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	16.984.251,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watulumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		13.159.886,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	6.385.636,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watulumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		4.439.654,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi BMD Prima	-			100 %	20.841.379,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-	-	9.816.071,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	11.400.163,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watulumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		4.373.596,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	9.441.216,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watulumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		5.442.475,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawalan Prima	-			100 %	358.875.500,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-	-	390.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	262.247.500,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watulumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		240.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	106.628.000,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watulumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Umum Prima	-			100 %	319.150.769,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-	-	294.361.389,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	422.543.589,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawati, Watutumu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		96.184.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	444.000.000,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawati, Watutumu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		581.331.100,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prima	-			100 %	1.447.703.534,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-	-	1.910.870.480,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6.336.214,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawati, Watutumu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		2.503.160,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	440.000.000,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawati, Watutumu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		894.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.002.367.320,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawati, Watutumu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.014.367.320,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BMD dengan baik	-			100 %	1.206.482.830,00			-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-	-	1.286.650.073,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	74.388.500,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawati, Watutumu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		41.915.500,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	254.924.080,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawati, Watutumu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		204.020.973,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun				5 Dokumen	159.107.810,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watulumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		234.410.597,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.1.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				320 Orang	750.810.197,00	- Kab. Minahasa Utara, Kalawat, Watulumou	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Stabilitas Daerah yang Terjamin	-		1.800.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
J U M L A H								18.981.806.276,00							22.484.476.896,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan diklat tentang peningkatan sarana dan prasarana penunjang kantor dan kediklatan yang berorientasi pada penguatan penggunaan teknologi dan informasi yang sistematis atas pengelolaan database dan standar kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga dengan penerapan pola kerja sehat *physical distancing* sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Rincian bab ini disajikan dalam tabel T-C.27.

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDUKTOR KINERJA (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN ANJAL PESENCAMAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEBANGSAH PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR AKHIR REGISTRASI PERANGKOT DAERAH	UNIT KINERJA PERANGKOT DAERAH PENGANGKUTAN	LOKASI						
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026										
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)					
Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Utara yang Berkemampuan	Penerapan ASN Provinsi Sulawesi Utara yang Berkemampuan	5	04	01	PROGRAM PEMBIYANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	17.122.820.215,00	100%	15.123.107.967,71	100%	15.749.325.312,51	100%	16.211.443.047,85	100%	16.419.004.011,27	100%	16.419.004.011	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MENAHASA UTARA, KALAWAT, WATUTUMU			
			5	04	01		1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Dokumen RENCANA, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKPD dan LKPD/LPPD	100%	100%	11.542.800,00	100%	45.304.766,71	100%	45.304.766,51	100%	68.067.587,65	100%	68.067.587,27	100%	68.067.587,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MENAHASA UTARA, KALAWAT, WATUTUMU	
			5	04	01		1.01	01	Pengurusan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.061.400,00	1 Dokumen	16.140.700,71	1 Dokumen	15.140.700,51	1 Dokumen	20.140.700,65	1 Dokumen	20.140.700,27	1 Dokumen	20.140.700,00		
			5	04	01		1.01	02	Koordinasi dan Pengurusan Dokumen RKA-SKD	Jumlah Dokumen RKA-SKD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.630.000	1 Dokumen	8.256.797	1 Dokumen	8.256.797	1 Dokumen	12.236.797	1 Dokumen	12.236.797	1 Dokumen	12.236.797		
			5	04	01		1.01	03	Koordinasi dan Pengurusan Dokumen Perubahan RKA-SKD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000	1 Dokumen	5.755.231	1 Dokumen	5.755.231	1 Dokumen	7.330.796	1 Dokumen	7.330.796	1 Dokumen	7.330.796		
			5	04	01		1.01	04	Koordinasi dan Pengurusan DPA-SKD	Jumlah Dokumen DPA-SKD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000	1 Dokumen	3.122.160	1 Dokumen	3.122.160	1 Dokumen	10.600.796	1 Dokumen	10.600.796	1 Dokumen	10.600.796		
			5	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Pengurusan Perubahan DPA-SKD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.681.490	1 Dokumen	3.122.160	1 Dokumen	3.122.160	1 Dokumen	6.830.796	1 Dokumen	6.830.796	1 Dokumen	6.830.796			
			5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Pengurusan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	2 Laporan	1.900.000	2 Laporan	8.867.698	2 Laporan	8.867.698	2 Laporan	10.867.598	2 Laporan	10.867.598	2 Laporan	10.867.598			
			5	04	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Prima	100%	100%	10.783.272.134	100%	11.076.575.582	100%	11.076.575.582	100%	11.076.575.582	100%	11.076.575.582	100%	11.076.575.582	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MENAHASA UTARA, KALAWAT, WATUTUMU		
			5	04	01	1.02		01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	10.230.313.500	12 Bulan	10.230.313.500	12 Bulan	10.230.313.500	12 Bulan	10.230.313.500	12 Bulan	10.230.313.500	12 Bulan	10.230.313.500		
			5	04	01	1.02		02	Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	508.814.621	12 Dokumen	785.126.810	12 Dokumen	785.126.810	12 Dokumen	785.126.810	12 Dokumen	785.126.810	12 Dokumen	785.126.810		
			5	04	01	1.02		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/Nilai Misi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggajian/Nilai Misi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.664.000	12 Dokumen	13.977.860	12 Dokumen	13.977.860	12 Dokumen	13.977.860	12 Dokumen	13.977.860	12 Dokumen	13.977.860		
			5	04	01	1.02		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Mutasi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Mutasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.670.000	12 Dokumen	3.400.000	12 Dokumen	3.400.000	12 Dokumen	3.400.000	12 Dokumen	3.400.000	12 Dokumen	3.400.000		
			5	04	01	1.02		05	Koordinasi dan Pengurusan Laporan Keuangan APBA Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan APBA Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.670.000	1 Dokumen	4.801.834	1 Dokumen	4.801.834	1 Dokumen	4.801.834	1 Dokumen	4.801.834	1 Dokumen	4.801.834		
			5	04	01	1.02		06	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.570.000	1 Dokumen	1.336.038	1 Dokumen	1.336.038	1 Dokumen	1.336.038	1 Dokumen	1.336.038	1 Dokumen	1.336.038		
			5	04	01	1.02		07	Koordinasi dan Pengurusan Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trimester/Semester SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	14 Laporan	14 Laporan	11.800.000	14 Laporan	13.159.886	14 Laporan	13.159.886	14 Laporan	13.159.886	14 Laporan	13.159.886	14 Laporan	13.159.886		
			5	04	01	1.02		08	Pengurusan Laporan dan Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.670.000	1 Dokumen	4.439.634	1 Dokumen	4.439.634	1 Dokumen	4.439.634	1 Dokumen	4.439.634	1 Dokumen	4.439.634		
			5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi BMD Prima	100%	100%	3.630.000	100%	9.816.071	100%	9.816.071	100%	9.816.071	100%	11.816.071	100%	11.816.071	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MENAHASA UTARA, KALAWAT, WATUTUMU	
			5	04	01	1.03	01		Pengurusan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.230.000	1 Dokumen	4.373.596	1 Dokumen	4.373.596	1 Dokumen	4.373.596	1 Dokumen	4.373.596	1 Dokumen	4.373.596		
			5	04	01	1.03	03		Revisi dan Pengurusan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Revisi dan Pengurusan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.400.000	12 Laporan	5.442.475	12 Laporan	5.442.475	12 Laporan	6.442.475	12 Laporan	6.442.475	12 Laporan	6.442.475		
			5	04	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Prima	100%	100%	367.834.000	100%	386.300.000	100%	386.300.000	100%	596.300.000	100%	596.300.000	100%	596.300.000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MENAHASA UTARA, KALAWAT, WATUTUMU		
			5	04	01	1.05		01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Daerah	1 Unit	1 Unit	65.000.000	1 Unit	6.300.000	1 Unit	6.300.000	1 Unit	6.300.000	1 Unit	6.300.000	1 Unit	6.300.000		
			5	04	01	1.05		02	Pengadaan Pakan Dinas dan/atau Pakan Karyawan	Jumlah Paket Pakan Dinas dan/atau Pakan Karyawan	112 Paket	112 Paket	84.800.000	112 Paket	120.000.000	112 Paket	120.000.000	112 Paket	240.000.000	112 Paket	240.000.000	112 Paket	240.000.000		
			5	04	01	1.05		09	Pondok dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Pegawai	25 Orang	25 Orang	148.034.000	10 Orang	100.000.000	15 Orang	100.000.000	16 Orang	150.000.000	16 Orang	160.000.000	16 Orang	160.000.000		
			5	04	01	1.05		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	112 Orang	112 Orang	35.000.000	112 Orang	80.000.000	112 Orang	80.000.000	112 Orang	80.000.000	112 Orang	80.000.000	112 Orang	80.000.000		
			5	04	01	1.05		11	Bandung Pakan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bandung Pakan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	112 Orang	112 Orang	35.000.000	112 Orang	80.000.000	112 Orang	80.000.000	112 Orang	80.000.000	112 Orang	80.000.000	112 Orang	80.000.000		
			5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Prima	100%	100%	391.354.000	100%	389.711.154	100%	315.255.751	100%	358.255.751	100%	413.255.751	100%	413.255.751	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MENAHASA UTARA, KALAWAT, WATUTUMU	
			5	04	01	1.06	01		Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	5 Paket	23.000.000	5 Paket	40.000.000	5 Paket	48.130.274	5 Paket	52.130.274	5 Paket	52.130.274				
			5	04	01	1.06	02		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	60.000.000	10 Paket	22.500.005	10 Paket	22.500.005	10 Paket	22.500.005	10 Paket	22.500.005	10 Paket	22.500.005		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEMERJA (OUTPUTS) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUNAN AKHIR PERENCANAAN	TARGET KEMERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KEMERJA PADA AKHIR TAHUN KEMERJA PERANGKAT DAERAH	UNIT KEMERJA PERANGKAT DAERAH PENANGKAT DAERAH	LOKASI
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027						
							Target (B)	Rp (P)	Target (B)	Rp (P)	Target (B)	Rp (P)	Target (B)	Rp (P)	Target (B)	Rp (P)	Target (B)	Rp (P)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
				5 04 01 1.06 03	Pemrosesan Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Dipek	10 Paket	10 Paket	10.000.000	5 Paket	17.211.149	5 Paket	17.211.149	10 Paket	20.211.149	10 Paket	34.211.149	10 Paket	34.211.149				
				5 04 01 1.06 04	Pemrosesan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dipek	10 Paket	10 Paket	20.000.000	10 Paket	40.000.000	10 Paket	40.000.000	10 Paket	63.894.362	10 Paket	63.894.362	10 Paket	98.894.362	10 Paket	98.894.362		
				5 04 01 1.06 05	Pemrosesan Barang Cetakan dan Pengemasan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengemasan yang Dipek	30 Paket	30 Paket	10.000.000	30 Paket	20.000.000	30 Paket	35.499.961	30 Paket	45.499.961	30 Paket	55.499.961	30 Paket	55.499.961	30 Paket	55.499.961		
				5 04 01 1.06 06	Pemrosesan Bahan Baku dan peralat pendukung produksi	Jumlah Paket Bahan Baku dan peralat pendukung produksi yang Dipek	12 Dokumen	12 Dokumen	4.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				5 04 01 1.06 09	Pengembangan Rantai Koordinasi dan Komunikasi	Jumlah Laporan Pengembangan Rantai Koordinasi dan Komunikasi	18 Laporan	18 Laporan	252.134.000	15 Laporan	150.000.000	15 Laporan	150.000.000	15 Laporan	150.000.000	15 Laporan	150.000.000	15 Laporan	150.000.000	15 Laporan	150.000.000		
				5 04 01 1.06 11	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada NPD	Jumlah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada NPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				5 04 02 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terbayarnya Aset BMD yang dibutuhkan	100%	100%	2.476.548.143	100%	654.879.857	100%	734.451.409	100%	883.907.503	100%	886.456.391	100%	886.456.391	100%	886.456.391	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA UTARA, KALAWAT, WATUTUMOU
				5 04 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Sebelan	Jumlah Unit Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Sebelan yang Dipek	1 Unit	1 Unit	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				5 04 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipek	1 Unit	1 Unit	35.000.000	1 Unit	34.000.000	1 Unit	34.000.000	1 Unit	34.000.000	1 Unit	34.000.000	1 Unit	34.000.000	1 Unit	34.000.000		
				5 04 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dipek	40 Paket	40 Paket	220.000.000	40 Paket	101.819.094	40 Paket	101.819.094	40 Paket	69.974.988	40 Paket	69.974.988	40 Paket	69.974.988	40 Paket	69.974.988		
				5 04 01 1.07 06	Pengadaan Perakitan dan Mebel Lainnya	Jumlah Unit Perakitan dan Mebel Lainnya yang Dipek	7 Unit	7 Unit	960.318.141	7 Unit	96.184.000	7 Unit	96.184.000	7 Unit	96.184.000	7 Unit	96.184.000	7 Unit	96.184.000	7 Unit	96.184.000		
				5 04 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Dipek	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	1.855.002	1 Paket	1.855.002	1 Paket	1.855.002	1 Paket	1.855.002	1 Paket	1.855.002	1 Paket	1.855.002		
				5 04 01 1.07 08	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipek	4 Unit	4 Unit	342.200.000	1 Unit	130.428.448	1 Unit	400.000.000	1 Unit	501.531.100	1 Unit	561.879.988	1 Unit	561.879.988	1 Unit	561.879.988		
				5 04 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipek	2 Unit	2 Unit	195.000.000	2 Unit	40.712.403	2 Unit	40.712.403	2 Unit	40.712.403	2 Unit	40.712.403	2 Unit	40.712.403	2 Unit	40.712.403		
				5 04 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipek	50 Unit	50 Unit	155.000.000	50 Unit	50.850.010	50 Unit	50.850.010	50 Unit	50.850.010	50	50.850.010	50	50.850.010	50	50.850.010		
				5 04 02 1.08	Pemeliharaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah Prima	100%	100%	1.910.870.230	100%	1.910.870.480	100%	1.910.870.480	100%	1.910.870.480	100%	1.910.870.480	100%	1.910.870.480	100%	1.910.870.480	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA UTARA, KALAWAT, WATUTUMOU
				5 04 01 1.08 01	Pemeliharaan Jasa Sural Menpurat	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Sural Menpurat	12 Laporan	12 Laporan	1.300.000	12 Laporan	2.503.160	12 Laporan	2.503.160	12 Laporan	2.503.160	12 Laporan	2.503.160	12 Laporan	2.503.160	12 Laporan	2.503.160		
				5 04 01 1.08 02	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dipek	12 Laporan	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	994.000.000	12 Laporan	994.000.000	12 Laporan	994.000.000	12 Laporan	994.000.000	12 Laporan	994.000.000	12 Laporan	994.000.000		
				5 04 01 1.08 03	Pemeliharaan Jasa Perakitan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Dipek	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000		
				5 04 01 1.08 04	Pemeliharaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Dipek	12 Laporan	12 Laporan	1.099.475.250	12 Laporan	1.002.367.320	12 Laporan	1.002.367.320	12 Laporan	1.002.367.320	12 Laporan	1.002.367.320	12 Laporan	1.002.367.320	12 Laporan	1.002.367.320		
				5 04 02 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BMD dengan baik	100%	100%	1.336.750.000	100%	747.650.073	100%	1.370.751.233	100	1.347.650.073	100%	1.483.662.549	100%	1.483.662.549	100%	1.483.662.549	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA UTARA, KALAWAT, WATUTUMOU
				5 04 01 1.09 01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Rupa Pemeliharaan dan Rupa Kendaraan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rupa atau Kendaraan yang Dipek	1 Unit	1 Unit	40.800.000	1 Unit	41.913.300	1 Unit	41.913.300	1 Unit	41.913.300	1 Unit	41.913.300	1 Unit	41.913.300	1 Unit	41.913.300		
				5 04 01 1.09 02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Rupa Pemeliharaan, Rupa dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Rupa atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipek	9 Unit	9 Unit	354.270.000	10 Unit	204.020.973	10 Unit	204.020.973	10 Unit	204.020.973	10 Unit	204.020.973	10 Unit	204.020.973	10 Unit	204.020.973		
				5 04 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipek	2 Unit	2 Unit	5.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000		
				5 04 01 1.09 06	Pemeliharaan Perakitan dan Mebel Lainnya	Jumlah Perakitan dan Mebel Lainnya yang Dipek	6 Unit	6 Unit	10.000.000	6 Unit	40.713.600	6 Unit	40.713.600	6 Unit	40.713.600	6 Unit	40.713.600	6 Unit	40.713.600	6 Unit	40.713.600		
5 04 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipek	1 Unit	1 Unit	2.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000						
5 04 01 1.09 09	Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipek	6 Unit	6 Unit	307.000.000	4 Unit	400.000.000	4 Unit	923.101.180	5 Unit	1.000.000.000	6 Unit	1.138.012.076	6 Unit	1.138.012.076	6 Unit	1.138.012.076						
5 04 01 1.09 10	Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipek	55 Unit	55 Unit	190.000.000	55 Unit	29.300.000	55 Unit	29.300.000	55 Unit	29.300.000	55 Unit	29.300.000	55 Unit	29.300.000	55 Unit	29.300.000						
5 04 01 1.09 11	Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipek	55 Unit	55 Unit	190.000.000	50 Unit	28.300.000	50 Unit	28.300.000	50 Unit	28.300.000	50 Unit	28.300.000	50 Unit	28.300.000	50 Unit	28.300.000						
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Berkompetensi	25%	30%	7.579.400.547,00	40%	6.889.434.149,00	60%	6.967.251.510,61	70%	7.171.787.896,00	90%	7.363.610.989,18	90%	7.363.610.989	90%	7.363.610.989	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA UTARA, KALAWAT, WATUTUMOU				
5 04 02 1.01	Pengembangan Kompetensi Televisi	Persentase ASN Lulusan Pengembangan Kompetensi dengan Predikat Baik (> 80,01)	90%	90%	3.791.564.019,00	91%	3.074.774.148,00	92%	3.352.691.510,61	92%	3.557.127.996,00	93%	3.648.950.989,18	93%	3.648.950.989	93%	3.648.950.989	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA UTARA, KALAWAT, WATUTUMOU				

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 sebagai Dokumen Perencanaan yang menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan sekaligus akan menjadi Tolok Ukur Pencapaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, perlu dipertimbangkan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat pengembangan sumber daya aparatur perlu menjadi prioritas di atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang sifatnya memberi dukungan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara periode 2021 – 2026. Penjabaran melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga dituntut mampu menghadapi tantangan era disrupsi yang bermuara pada arah pengembangan kompetensi dengan pendekatan sistemik holistik dalam rangka mewujudkan Human Capital Aparatur berbasis kompetensi bidang tugas.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat diwujudkan dan dilaksanakan serta bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Watutumou, Juli 2023

KEPALA BADAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA


Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M. Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650509 198602 1 004